BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak-pihak eksternal dalam organisasi. Organisasi yang di maksud disini adalah organisasi bisnis, organisasi sektor publik, dan organisasi voluntir & sosial. Di sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparasi oleh lembaga-lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrument utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Pengertian akuntansi sektor publik menurut Renyowijoyo (2008:1) adalah "*sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik*".

Akuntansi sektor publik di arahkan untuk mencapai hasil tertentu yang harus memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik

berbeda dengan sektor swasta karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama adalah tujuan, sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi non laba. Tujuannya hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

Era globalisasi telah berjalan dan bergulir di muka kita, upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik menjadikan hal yang sangat penting. Sebagai bagian dari pergaulan masyarakat internasional, masyarakat Indonesia harus senantiasa tanggap terhadap perubahan yang demikian cepatnya dan sekaligus harus mampu melebur dalam berbagai aktivitasnya. Oleh sebab itu, langkah-langkah strategis perlu segera diupayakan untuk diwujudkan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan operasional guna merealisasikannya. Salah satu langkah strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ketiga pilar yang dimaksud adalah: (1)Transparansi; (2)Partisipasi; dan (3)Akuntabilitas**.**

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan suatu paket kebijakan tentang pengelolaan negara yaitu: Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Menurut Jannaini dalam Nurlaila (2014) Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif seperti relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kotamadya Tangerang Selatan".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

"Apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi keuangan sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?"

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi keuangan sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terbagi dalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti dari perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi pada sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah, yang saat ini masih sangat jarang dijadikan bahan kajian secara seksama pada pemerintah daerah di Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wacana pengetahuan khusunya di bidang akuntansi tentang penerapan akuntansi keuangan sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menyediakan informasi yang kemungkinan diperlukan sebagai referensi dan pembanding atau dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang organisasi pemerintahan pada masa yang akan datang.